

## GOOD GOVERNANCE DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Kasus Tulang Bawang)

Bingar Handal Pratama<sup>1</sup>, Erlin Kurniati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: [bingarpratama0510@gmail.com](mailto:bingarpratama0510@gmail.com)<sup>1</sup>

[erlinkurniati@radenintan.ac.id](mailto:erlinkurniati@radenintan.ac.id)<sup>2</sup>

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip good governance dalam manajemen pembangunan daerah di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance di Tulang Bawang masih menghadapi tantangan struktural, kultural, dan kelembagaan. Lima aspek utama good governance partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi belum berjalan optimal. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang bersifat simbolis dan minim inklusivitas; transparansi informasi publik masih terbatas dan kurang komunikatif; akuntabilitas lebih menekankan aspek administratif daripada substansi kebijakan; efektivitas pembangunan terhambat koordinasi antar-OPD; serta efisiensi anggaran terganggu oleh struktur birokrasi yang kaku dan kurang inovatif. Studi ini menekankan pentingnya transformasi kelembagaan melalui digitalisasi layanan publik, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan peran masyarakat sipil sebagai aktor utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.</i></p>	<p>Diajukan: 24-2-2025 Diterima: 02-4-2025 Diterbitkan : 16-04-2025</p>
<p><b>Abstract</b></p> <p><i>This study analyzes the implementation of good governance principles in regional development management in Tulang Bawang Regency, Lampung Province. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and document analysis from relevant local government organizations. The findings reveal that the application of good governance in Tulang Bawang still faces significant structural, cultural, and institutional challenges. Five core aspects participation, transparency, accountability, effectiveness, and efficiency are not yet fully realized. Public participation in Musrenbang (Development Planning Forums) remains symbolic and lacks inclusivity; transparency of public information is limited and poorly communicated; accountability is focused more on administrative formalities than on policy outcomes; the effectiveness of development programs is hindered by poor inter-agency coordination; and budget efficiency suffers due to rigid bureaucracy and a lack of innovation. The study emphasizes the urgent need for institutional transformation through digital public services, capacity building for civil servants, and strengthening the role of civil society as a key actor in inclusive and sustainable development.</i></p>	<p><b>Kata kunci:</b> Good Governance, Manajemen Pembangunan, Partisipasi Publik, Transparansi, Akuntabilitas, Tulang Bawang</p> <p><b>Keywords:</b> Good Governance, Development Management, Public Participation, Transparency, Accountability, Tulang Bawang</p>
<p><b>Cara mensitasi artikel:</b> Pratama, B.H., &amp; Kurniati, E. (2025). Good Governance dalam Manajemen Pembangunan Daerah. <i>IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy</i>, 3(2), 200-210. <a href="https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN">https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN</a></p>	

## PENDAHULUAN

Kerangka konseptual yang bertabiat filosofis, teoretis, serta analitis, tata kelola berperan selaku bawah yang berharga buat tingkatkan pandangan hidup, paradigma, budaya, serta administrasi pemerintahan (manajemen publik). Selaku bagian dari penerapan tata kelola berkinerja besar, konsep tata kelola ini bertujuan buat menggapai tidak cuma arahan organisasi internal namun pula elemen eksternal, keluaran, hasil, serta dampak, spesialnya upaya buat mewujudkan kesejahteraan yang adil serta sejahtera untuk rakyatnya. Lebih jauh, konsep ini tidak diragukan lagi berkaitan dengan tujuan buat membuat aparatur publik lebih inventif serta kompetitif dalam skala lokal, nasional, serta internasional.

Bersamaan dengan meningkatnya aspirasi warga buat akuntabilitas, keterbukaan, keterlibatan, serta kemanjuran dan efisiensi dalam pengoperasian pemerintahan, gagasan tata kelola yang baik terus menjadi berarti. Bawah fundamental buat membenarkan kalau pembangunan tidak cuma berjalan cocok rencana namun pula difokuskan pada kebutuhan serta kepentingan warga yang lebih luas merupakan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Penataan program yang sukses cumalah salah satu aspek tata kelola yang baik; aspek yang lain tercantum implementasi program, pemantauan berkepanjangan, serta penilaian.

Pemerintah wilayah memegang kedudukan strategis yang krusial dalam menggapai pembangunan yang berkeadilan serta berkepanjangan di masa desentralisasi serta otonomi wilayah dikala ini. Cocok dengan kemampuan serta ciri wilayah, otonomi membagikan keleluasaan kepada wilayah buat mengelola sumber energi serta memastikan arah strategi pembangunan. Tetapi, otonomi pula mempunyai kelemahan, paling utama dalam perihal menegakkan pemerintahan yang transparan, efektif, serta pro-rakyat.

Salah satu wilayah otonomi Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, menawarkan riset permasalahan menarik buat mempraktikkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pembangunan wilayah. Ciri politik, sosial, serta ekonomi wilayah ini membagikan kesempatan sekalian hambatan buat mempraktikkan gagasan tata kelola pemerintahan yang baik. Contoh nyata tentang gimana tata kelola pemerintahan yang baik bisa tingkatkan mutu layanan publik, memesatkan pembangunan infrastruktur, memberdayakan warga, serta tingkatkan kesejahteraan warga bisa ditemui dalam riset permasalahan Tulang Bawang.

Diharapkan kalau pemerintah wilayah hendak lebih siap buat menjawab harapan warga, tingkatkan keyakinan publik, serta membina area yang menunjang pembangunan bila gagasan tata kelola pemerintahan yang baik jadi landasan untuk penciptaan serta penerapan strategi pembangunan. Oleh sebab itu, riset ini relevan buat memastikan sepanjang mana proses pembangunan wilayah Tulang Bawang sudah memasukkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan gimana kesempatan serta tantangan di masa depan bisa dikelola secara strategis buat tingkatkan kinerja pemerintah serta pembangunan wilayah secara totalitas.

Selaku salah satu wilayah otonom di Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang pasti mengalami beberapa hambatan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien. Hambatan tersebut tidak cuma bersumber dari sedikitnya pendanaan serta sumber energi manusia, namun pula dari permasalahan akuntabilitas birokrasi, sedikitnya

transparansi pengelolaan keuangan wilayah, serta sedikitnya keterlibatan warga dalam proses penataan kebijakan. Bersumber pada hasil evaluasi kinerja pemerintah wilayah oleh Departemen Dalam Negara serta lembaga independen yang lain, Kabupaten Tulang Bawang masih mengalami beberapa hambatan dalam mengoptimalkan pelayanan publik serta kurangi kemiskinan.

Keadaan ini menampilkan kalau pelaksanaan konsep tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Tulang Bawang masih butuh ditingkatkan. Misalnya, dalam suasana ini, proses perencanaan pembangunan belum seluruhnya mempraktikkan konsep pelibatan warga. Salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan yang cocok dengan kebutuhan serta aspirasi warga merupakan pelibatan warga secara aktif. Perihal ini cocok dengan hasil riset Setyowati serta Nugroho (2019) yang melaporkan kalau tingkatan partisipasi warga dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap daya guna program pembangunan wilayah.

Aspek akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan wilayah pula jadi fokus riset. Banyaknya kesenjangan dalam pelaporan keuangan serta penerapan aktivitas pembangunan ditemui dalam laporan hasil audit Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pengelolaan anggaran di beberapa Organisasi Fitur Wilayah (OPD) Tulang Bawang. Hasil ini menampilkan kalau dibutuhkan pergantian birokrasi yang lebih merata serta mekanisme pengawasan internal belum berjalan dengan baik.

Dari sisi kelembagaan, kenaikan keahlian aparaturnya pemerintah wilayah dalam membuat kebijakan serta melakukan inisiatif pembangunan pula dibutuhkan. Buat membangun pemerintah wilayah yang fleksibel serta responsif terhadap pergantian warga dibutuhkan beberapa prasyarat berarti, antara lain kenaikan kapasitas sumber energi manusia, pembenahan tata kelola birokrasi, serta pembinaan inovasi dalam pelayanan publik.

Buat mengenali unsur-unsur yang menunjang serta membatasi pelaksanaan asas-asas good governance dalam pengelolaan pembangunan wilayah, riset permasalahan tentang good governance di Kabupaten Tulang Bawang jadi berarti serta relevan. Diharapkan hasil riset ini bisa menolong dalam penataan rencana kebijakan pembangunan yang lebih sukses serta berfokus pada kebutuhan warga luas.

Keadaan tujuan Tulang Bawang selaku wilayah dengan kemampuan pertanian serta sumber energi alam yang signifikan namun belum mempunyai pembangunan sosial serta ekonomi yang pesat menggarisbawahi berartinya strategi pembangunan berbasis tata kelola. Dalam suasana ini, tata kelola yang baik ialah paradigma pembangunan yang memandang warga selaku subjek serta bukan objek kebijakan, tidak hanya selaku instrumen teknis.

## **METODE**

Pengelolaan pembangunan wilayah Kabupaten Tulang Bawang berlandaskan pada konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Bersumber pada keadaan di lapangan, tata cara ini diseleksi sebab dikira sangat relevan buat mengkaji fenomena sosial politik serta birokrasi secara kontekstual, dinamis, serta merata.

Riset ini dicoba di Kabupaten Tulang Bawang, dengan fokus utama pada organisasi pemerintah wilayah, khususnya organisasi fitur wilayah (OPD) semacam Dinas Pekerjaan

Universal, Bappeda, serta Inspektorat Wilayah yang mempunyai pengaruh langsung terhadap perencanaan serta penerapan pembangunan. Riset ini berfokus pada tata cara tata kelola pemerintahan yang baik, yang meliputi pengelolaan program pembangunan wilayah secara efisien, efektif, akuntabel, transparan, serta mengaitkan warga.

#### **Sumber Data**

1. Data primer

Wawancara mendalam dengan informan kunci, tercantum pejabat struktural OPD, anggota DPRD, tokoh warga, lembaga swadaya warga setempat, serta akademisi yang menguasai konteks pembangunan wilayah Tulang Bawang, digunakan buat mengumpulkan informasi primer.

2. Data sekunder

RPJMD, LKjIP, penemuan audit BPK, dan penerbitan, laporan, serta kabar wilayah terpaut yang lain ialah dokumen formal pemerintah wilayah yang informasi sekundernya dikumpulkan.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan 2 langkah, yaitu:

1. Wawancara semi-terstruktur digunakan buat mengumpulkan data terperinci sembari membagikan fleksibilitas pada jawaban informan.
2. Observasi non-partisipatif, yang dicoba buat menguasai dinamika serta proses internal yang ikut serta dalam penerapan program pembangunan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Good Governance di Kabupaten Tulang Bawang masih mengalami beberapa hambatan struktural serta kultural yang pelik dalam upayanya mempraktikkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pembangunan wilayah. Pendekatan pembangunan wilayah belum seluruhnya menganut gagasan tata kelola pemerintahan yang baik, yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, efisiensi, daya guna, serta keadilan. Masih ada kecenderungan pemerintah wilayah mengadopsi model tata kelola yang berpusat pada pemerintah, di mana negeri membuat seluruh keputusan serta pelakon nonpemerintah, tercantum zona bisnis serta warga sipil, tidak diberi kewenangan yang lumayan buat jadi mitra pembangunan yang strategis.

Idealitas norma serta realitas di lapangan masih berbeda secara signifikan dalam implementasinya, walaupun sudah terdapat upaya normatif buat mempraktikkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, semacam penataan dokumen perencanaan partisipatif serta pelaporan kinerja secara berkala. Tetapi, prosedur pemerintahan kerap kali terjerumus dalam birokrasi yang rumit, kurang kreatif, serta kurang mempunyai pengawasan substantif. Dengan demikian, mutu pembangunan wilayah secara totalitas terdampak oleh kesenjangan ini, baik dari segi pencapaian penciptaan ataupun hasil.

Kesimpulan utama riset ini dikategorikan ke dalam 5 topik utama yang mewakili nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik di Tulang Bawang, khususnya:

##### **1. Partisipasi Publik di Kabupaten Tulang Bawang**

Keterlibatan langsung ataupun tidak langsung warga dalam pengambilan keputusan lewat lembaga perwakilan yang bisa menyalurkan tujuan mereka diketahui selaku partisipasi. Keterlibatan yang konstruktif serta kebebasan berdialog dan berasosiasi jadi bawah keterlibatan ini. Salah satu prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik merupakan keterlibatan publik, paling utama dalam periode desentralisasi Indonesia,

yang menawarkan banyak peluang untuk keterlibatan warga dalam proses pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dilaksanakan di tingkatan desa serta distrik di Kabupaten Tulang Bawang, sudah memformalkan proses partisipasi. Pada realitasnya, tujuan dari forum ini merupakan buat mengumpulkan kemauan warga sehingga inisiatif pembangunan betul-betul didasarkan pada kebutuhan lokal. Tetapi pada realitasnya, keterlibatan warga dalam Musrenbang masih kerap berupa formalitas serta seremonial. Perihal ini menampilkan terdapatnya kesenjangan antara konsep idealis perencanaan pembangunan partisipatif serta pelaksanaan praktisnya.

Masyarakat Tulang Bawang yang mendatangi Musrenbang sebagian besar cuma jadi partisipan pasif, bagi riset lokal serta nasional. Sebab minimnya dana, lobi yang kurang baik, serta dominasi pemain elit lokal dalam proses pemilihan program, tujuan yang diungkapkan tidak senantiasa tercermin dalam dokumen perencanaan. Kondisi ini tidak berubah-ubah dengan gagasan partisipasi tokenistik, di mana masyarakat negeri tidak diberi keahlian apa juga buat mempengaruhi opsi pemerintah; kebalikannya, partisipasi cuma formalitas. Warga diikutsertakan dalam kerangka Musrenbang, namun tidak diberi suara dalam memastikan prioritas pembangunan apa yang diresmikan.

Minimnya representasi kelompok rentan, tercantum wanita, anak muda, penyandang disabilitas, serta warga adat, memperparah minimnya keterlibatan ini. Mereka masih sangat sedikit berpartisipasi dalam forum formal semacam Musrenbang. Perihal ini menampilkan kalau pemerintah pembangunan wilayah belum seluruhnya mengadopsi pendekatan inklusif selaku konsep panduan. Ketimpangan sosial bisa bersinambung serta kesenjangan antara kelompok warga melebar sebab keterlibatan yang tidak setara dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan kritis yang minimum pula dipengaruhi oleh tradisi paternalistik warga Tulang Bawang yang masih terdapat. Biasanya, warga setempat berlagak hati-hati dalam menyuarakan gagasan yang berbeda dengan gagasan orang-orang yang berkuasa ataupun pemimpin desa. Oleh sebab itu, suara-suara yang didengar dalam Musrenbang kerap kali bertabiat normatif serta seragam, sehingga tidak mewakili bermacam kebutuhan dalam warga.

Kapasitas warga buat mengorganisasikan serta mengekspresikan pemikiran mereka secara leluasa tanpa paksaan sangat berarti untuk daya guna keterlibatan publik. Banyak aspek berarti pembangunan wilayah yang terdampak oleh rendahnya tingkatan keterlibatan publik. Awal, kebijakan yang timbul kerap kali dibangun oleh kepentingan kelompok dominan daripada didasarkan pada kebutuhan lokal yang sebetulnya. Kedua, sokongan serta keterlibatan warga dalam penerapan program pada kesimpulannya menyusut akibat hilangnya rasa kepemilikan atas inisiatif pembangunan. Ketiga, sebab kemauan kelompok minoritas kerap kali diabaikan, kesenjangan pembangunan antara wilayah serta kelompok sosial terus menjadi besar.

Model partisipasi Kabupaten Tulang Bawang wajib diganti buat menuntaskan permasalahan tersebut. Awal serta paling utama, kenaikan kapasitas warga lewat literasi dalam proses perencanaan pembangunan, pelatihan advokasi, serta pemahaman hendak hak-hak masyarakat negeri merupakan perihal yang berarti. Kedua, pengganti Musrenbang top-down bisa berbentuk pemakaian model partisipasi deliberatif semacam juri masyarakat negeri, dialog warga, serta forum masyarakat negeri. Ketiga, dengan menawarkan kuota partisipasi serta fasilitasi tertentu, pemerintah wilayah wajib membuat program aksi afirmatif yang membenarkan partisipasi aktif dari populasi yang

kurang beruntung. Terakhir, e-Musrenbang serta platform digital yang lain bisa meningkatkan fleksibilitas serta transparansi akses masyarakat negeri terhadap proses perencanaan dengan mendigitalkan ruang keterlibatan publik.

## **2. Transparansi di Kabupaten Tulang Bawang**

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengutamakan keterbukaan data publik, kejelasan dalam proses pengambilan keputusan, serta penyediaan informasi yang andal serta bisa diakses oleh seluruh susunan warga, sebagian besar didasarkan pada transparansi. Web website pemerintah wilayah, papan data desa, serta laporan tahunan dari tiap Organisasi Fitur Wilayah (OPD) cumalah sebagian fitur yang digunakan di Kabupaten Tulang Bawang buat mendesak keterbukaan. Perwujudan konsep transparansi masih mengalami banyak hambatan di lapangan, paling utama pada tataran implementasi serta pemerataan akses data, walaupun terdapat upaya normatif buat berkomitmen pada keterbukaan data.

Warga masih belum mendapatkan data yang lumayan tentang rencana kerja pemerintah, penyaluran serta pemanfaatan keuangan desa, ataupun rincian anggaran pembangunan yang berlaku di banyak warga pedesaan Tulang Bawang. Perihal ini paling utama diakibatkan oleh 2 aspek: awal, minimnya infrastruktur data yang ramah warga, serta kedua, minimnya inisiatif pejabat pemerintah wilayah dalam mendistribusikan data publik secara aktif serta metodis. APBD, penemuan audit internal, serta evaluasi program pembangunan cumalah sebagian dari sekian banyak dokumen berarti yang tidak bisa diakses publik ataupun cuma bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu. Fenomena ini ialah gambaran dari oposisi birokrasi terhadap aplikasi transparansi, yang secara langsung bisa membatasi keahlian publik buat melaksanakan kontrol sosial serta membagikan jalur untuk penyalahgunaan kekuasaan.

Hambatan lain yang lumayan signifikan merupakan data yang tidak gampang dimengerti. Warga universal, khususnya yang berpendidikan rendah, merasa kesusahan menguasai laporan perencanaan serta pelaporan keuangan sebab kerap kali ditulis dengan bahasa yang sangat teknokratis serta penuh dengan jargon administratif. Pemerintah serta warga yang sepatutnya jadi partisipan berarti dalam proses pembangunan wilayah, dampaknya komunikasi jadi tidak efisien. Revisi ketepatan waktu serta format pelaporan tercatat dalam laporan Tubuh Pengelolaan Keuangan serta Peninggalan Wilayah (BPKAD) Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023. Tetapi, sebab transparansi tersebut belum diimbangi dengan media penyebaran data yang lebih responsif serta gampang dimengerti, semacam infografis digital, media sosial, ataupun aplikasi informasi terbuka, hingga data tersebut belum hingga ke warga universal.

Ketiadaan transparansi yang substantif berdampak pada beberapa hal krusial. Pertama, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jujur dan terbuka, mereka cenderung menjadi apatis dan sinis terhadap program-program pemerintah. Kedua, lemahnya pengawasan publik karena minimnya akses terhadap data dan dokumen pembangunan, yang seharusnya dapat menjadi dasar untuk mendorong akuntabilitas. Ketiga, tertutupnya ruang partisipasi aktif masyarakat, karena mereka tidak memiliki cukup informasi untuk dapat mengambil sikap atau menyampaikan masukan secara substansial terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

Minimnya transparansi substantif mempunyai beberapa akibat berarti. Awal, minimnya keyakinan warga terhadap tata kelola pemerintahan wilayah. Warga terkadang jadi jemu serta acuh tidak acuh terhadap inisiatif pemerintah kala tidak memperoleh data yang jelas serta jujur. Kedua, sedikitnya pengawasan publik sebab informasi serta dokumen pembangunan yang sepatutnya jadi bawah buat mendesak akuntabilitas tidak bisa diakses secara luas. Ketiga, publik tidak bisa berpartisipasi secara aktif sebab tidak mempunyai pengetahuan yang dibutuhkan buat membuat keputusan ataupun membagikan umpan balik yang signifikan terhadap formulasi serta penerapan kebijakan. Dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif serta progresif buat tingkatkan transparansi. Awal, butuh lekas dibentuk sistem e-government berbasis platform yang gampang diakses, semacam sistem pemantauan proyek daring publik ataupun aplikasi data anggaran desa. Kedua, mengarahkan aparatur pemerintah, khususnya di tingkatan desa serta kecamatan, supaya sanggup mengomunikasikan data kepada publik secara visual serta gampang dimengerti, tercantum animasi interaktif, infografis, ataupun film pendek. Ketiga, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Data Publik, pemerintah wajib mendesak strategi transparansi proaktif, ialah keterbukaan data tanpa menunggu permintaan dari publik.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bisa tingkatkan keyakinan publik, mendesak partisipasi aktif, serta menggapai pembangunan yang bertanggung jawab serta responsif terhadap tuntutan masyarakat dengan membangun budaya keterbukaan yang melampaui birokrasi.

### **3. Akuntabilitas di Kabupaten Tulang Bawang**

Kewajiban aparat pemerintah buat mengelola sumber energi, memberi tahu, serta mengatakan seluruh aksi serta aktivitas yang berkaitan dengan pemakaian sumber energi publik kepada pemberi mandat (Kepala Sekolah) diketahui selaku akuntabilitas. Membagikan data kepada pihak yang berkepentingan tentang kinerja serta aksi pemerintah diketahui selaku akuntabilitas publik.

Salah satu prinsip bawah tata kelola pemerintahan yang efisien merupakan akuntabilitas, yang menuntut seluruh pejabat pemerintah buat bertanggung jawab atas kebijakan, inisiatif, serta pengeluaran dana publik yang mereka jalani. Konsep akuntabilitas ditunjukkan di Kabupaten Tulang Bawang lewat kemajuan di bidang administrasi tercantum pembuatan laporan keuangan tahunan serta penerapan audit internal secara berkala. Tetapi, tanggung jawab substantif yaitu akuntabilitas atas konsekuensi (hasil) serta akibat (akibat) pembangunan pada pemangku kepentingan serta masyarakat belum optimal. Walaupun banyak inisiatif pembangunan dikira efisien secara teori, inisiatif tersebut bisa jadi tidak betul-betul menanggapi kebutuhan warga yang sesungguhnya.

Kesan warga terhadap khasiat pembangunan serta laporan formal sangat berbeda. Perihal ini diakibatkan oleh tidak terdapatnya saluran umpan balik publik serta forum penilaian yang mengaitkan secara aktif orang dalam mengevaluasi hasil kebijakan yang diresmikan. LKPJ kepada pemerintah pusat ialah contoh akuntabilitas vertikal yang berjalan dengan baik. Kala LSM, media lokal, tokoh warga, serta kelompok rentan tidak berpartisipasi secara aktif, tanggung jawab horizontal kepada publik serta DPRD kerap kali cuma formalitas. Dengan demikian, banyak evaluasi publik kehabisan nilai substantifnya selaku perlengkapan buat revisi serta koreksi kebijakan.

Secara teknis, akuntabilitas Tulang Bawang terus menjadi terhambat oleh buruknya integrasi pelaporan kinerja serta sistem perencanaan. Penanda kinerja yang bisa diukur secara publik belum terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan semacam RPJMD. Kebanyakan OPD belum menetapkan KPI yang jelas, terukur, serta relevan terhadap tujuan pembangunan, bagi evaluasi yang dicoba oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2022. Sebab itu, laporan kinerja kerap kali menyoroti masukan serta keluaran yang nyata, tercantum kuantitas struktur ataupun aktivitas, tanpa menampilkan seberapa besar program tersebut sudah mempengaruhi pergantian sosial serta ekonomi.

Minimnya tanggung jawab ini mempunyai beberapa akibat. Awal, minimnya pengawasan publik sebab warga universal tidak mempunyai pengetahuan serta ruang yang dibutuhkan buat memperhitungkan program secara kritis. Kedua, apakah terdapat kegagalan program ataupun pemborosan duit, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Ketiga, evaluasi pembangunan kerap kali cuma berpusat pada realisasi anggaran serta aktivitas raga daripada hasil. Oleh sebab itu, buat tingkatkan tanggung jawab pemerintah wilayah, dibutuhkan langkah-langkah strategis.

Tulang Bawang bisa memakai beberapa strategi, antara lain: (1) menghasilkan sistem pelaporan berbasis hasil yang menyoroti capaian serta akibat nyata dari kebijakan; (2) menguatkan kedudukan Inspektorat serta audit internal, tidak cuma dalam aspek keuangan namun pula dalam mengevaluasi substansi program; (3) mendesak digitalisasi pelaporan lewat pembuatan dasbor kinerja publik yang bisa diakses publik secara daring; serta (4) tingkatkan guna pengawasan DPRD serta warga sipil lewat forum dengar komentar publik ataupun diskusi pembangunan terbuka. Buat menjamin tercapainya pembangunan, akuntabilitas berperan selaku tugas administratif sekalian perlengkapan yang jitu buat kontrol serta keterlibatan sosial.

#### **4. Efektivitas di Tulang Bawang**

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang masih terkendala oleh beberapa kasus sistemik serta struktural. Salah satu kasus utamanya merupakan ketidaksesuaian antara penerapan program di lapangan dengan dokumen perencanaan strategis semacam RPJMD serta RKPD. Ketidakesuaian ini menyebabkan pemborosan anggaran sebab alokasi yang tidak cocok dengan kebutuhan warga serta sasaran yang galat dikala program pembangunan dilaksanakan. Minimnya koordinasi antar OPD jadi salah satu pemicu permasalahan ini. Tanpa terdapatnya kerja sama lintas zona yang mencukupi, tiap-tiap OPD kerap kali beroperasi dalam kerangka sektoral. Dampaknya, banyak program yang cuma berjalan sebagian serta tidak silih menunjang, apalagi terkadang tumpang tindih. Fragmentasi semacam ini tidak cuma memperlambat perkembangan namun pula mempersulit pencapaian tujuan pembangunan wilayah secara komprehensif. Daya guna pengelolaan pembangunan wilayah sangat dipengaruhi oleh kerja sama lintas zona serta koherensi kebijakan. Perencanaan yang tidak terpadu secara sektoral, tegasnya, kerap kali menciptakan program yang tidak efisien serta tidak berakibat pada kenaikan kesejahteraan warga. Perihal ini nampak dari penerapan inisiatif pembangunan di Tulang Bawang yang tidak secara signifikan tingkatkan penanda makro semacam pengangguran, angka kemiskinan, ataupun mutu layanan publik.

Tidak hanya itu, struktur birokrasi di wilayah ini kerap hadapi rotasi jabatan struktural yang melemahkan keberlanjutan kebijakan, mempertahankan pola kerja

administratif yang ketat, serta kurang responsif terhadap pergantian kebutuhan warga. Dalam bukunya *The Politics of Bureaucracy*, Peters (2010) menegaskan kalau birokrasi publik yang kurang responsif serta konsolidasi hendak mempersulit penerapan kebijakan secara efisien, paling utama dalam mengalami tata kelola pemerintahan wilayah yang rumit.

Oleh sebab itu, buat tingkatkan daya guna pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang, butuh dicoba penguatan koordinasi lintas OPD, kenaikan kapasitas birokrasi dalam mengelola serta melakukan program secara berkepanjangan, dan revisi mekanisme penataan perencanaan pembangunan yang lebih terpadu serta berbasis informasi. Tidak hanya itu, proses monitoring serta penilaian butuh ditingkatkan, tidak cuma pada tataran output namun pula pada faktor hasil serta akibat kebijakan terhadap warga luas.

### **5. Efisiensi Pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang**

Tingkatan efisiensi pemerintah wilayah dalam menggunakan sumber energi yang dimilikinya, baik sumber energi keuangan, manusia, ataupun teknologi, buat menggapai tujuan pembangunan tercermin dari efisiensinya. Dalam melakukan program pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang, efisiensi masih jadi hambatan yang lumayan berarti. Perihal ini ditunjukkan dengan kecenderungan penganggaran teratur, di mana sebagian besar belanja wilayah dialokasikan buat bayaran operasional daripada buat inisiatif sosial ekonomi kreatif ataupun usaha produktif yang berakibat berkepanjangan untuk warga.

Banyak program wilayah yang cuma ialah kopian dari program tahun kemudian, tanpa kreativitas sama sekali, alih-alih dimulai dengan riset tentang kebutuhan warga yang sesungguhnya. Perihal ini menampilkan kalau perencanaan masa depan belum menggunakan sebaik-baiknya prosedur evaluasi serta pendidikan dari penerapan program lebih dahulu. Oleh sebab itu, program yang dilaksanakan kerap kali tidak lumayan fleksibel buat disesuaikan dengan tuntutan warga serta era yang terus berganti.

Teknologi data masih belum banyak digunakan selaku perlengkapan buat tingkatkan produktivitas di tempat kerja. Minimnya sistem data manajemen yang terpadu di banyak OPD di Tulang Bawang menyebabkan duplikasi informasi serta lambatnya pengambilan keputusan. Sementara itu, bila terstruktur dengan benar, digitalisasi pemerintah ataupun e-government teruji bisa tingkatkan efisiensi serta keterbukaan layanan publik sekalian memesatkan kerja sama lintas zona.

Cuma dengan sistem pengendalian manajerial yang kokoh, integrasi informasi lintas zona, serta budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja, program pembangunan wilayah bisa menggapai efisiensi anggaran. Sayangnya, budaya birokrasi di tempat kerja Tulang Bawang masih lebih mengutamakan tata cara administratif serta prosedural daripada kinerja yang didasarkan pada hasil ataupun akibat. Keadaan ini terus menjadi diperburuk oleh kekurangan sistem penghargaan serta hukuman, sebab tidak terdapat insentif yang lumayan buat memotivasi mesin supaya beroperasi lebih efisien serta efektif.

Gagasan Tata Kelola yang Lumayan Baik menekankan perlunya menghasilkan lembaga yang instan serta peka terhadap area lokal. Dia menegaskan kalau efisiensi bisa ditingkatkan secara bertahap dengan berkonsentrasi pada kenaikan kinerja organisasi serta menguatkan kapasitas kelembagaan daripada mengawali dengan modifikasi yang signifikan. Strategi ini pas buat digunakan di Tulang Bawang, yang dikala ini lagi

membangun sistem manajemen pembangunan yang lebih kontemporer serta adaptif buat menanggulangi permasalahan wilayah.

Oleh sebab itu, sangat berarti buat mendigitalkan sistem data publik, mengganti penganggaran berbasis kinerja, serta menghasilkan budaya kerja yang mengutamakan hasil nyata serta akibat komunitas buat tingkatkan efisiensi di Tulang Bawang. Buat membenarkan kalau efisiensi lebih dari semata-mata slogan serta tercermin dalam pencapaian pembangunan, inisiatif tersebut pula wajib didukung oleh pelatihan staf serta kenaikan sistem pemantauan internal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Tulang Bawang masih mengalami sebagian hambatan yang lumayan berarti, baik dari aspek kelembagaan, kultural, ataupun struktural. Walaupun sudah ada beberapa fitur kebijakan serta proses partisipatif, semacam Musrenbang, yang bertabiat normatif, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih bertabiat prosedural serta belum sanggup mewakili aspirasi warga secara mencukupi. Tidak hanya itu, masih ada kesenjangan keterbukaan data publik, akuntabilitas administratif yang masih besar, koordinasi lintas zona yang masih kurang sehingga membatasi daya guna program, dan efisiensi anggaran yang belum didetetapkan oleh kinerja serta inovasi. Tidak hanya bertumpu pada pendekatan teknis, upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik wajib dilihat selaku proses yang berkesinambungan yang mangulas isu pergantian budaya birokrasi, penguatan kedudukan warga sipil, serta penciptaan sistem digitalisasi yang inklusif. Apabila Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sukses memadukan pergantian kelembagaan dengan keterlibatan aktif warga serta kenaikan keahlian sumber energi manusia, hingga bisa jadi model pemerintahan kontemporer, transparan, serta partisipatif.

Sedangkan saran penelitian ini yaitu:

### 1. Penguatan Partisipasi Publik Substantif

Buat memenuhi proses Musrenbang, pemerintah wilayah wajib memperluas bentuk-bentuk keterlibatan musyawarah, semacam juri masyarakat, wacana warga, serta forum masyarakat. Kebijakan aksi afirmatif serta dorongan teknis dibutuhkan buat menjamin partisipasi penduduk yang kurang sanggup.

### 2. Transparansi Progresif dan Adaptif

Pemerintah wajib menghasilkan tata cara yang gampang diakses serta dimengerti buat mengatakan data publik, tercantum infografis, film instruksional, serta platform digital berbasis informasi terbuka yang sediakan akses real-time kepada publik terhadap rencana serta realisasi anggaran.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Bappeda Kabupaten Tulang Bawang. (2022). *Laporan Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021*.
- BPK RI. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 – Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang*.

- BPKAD Tulang Bawang. (2023). *Laporan Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022*. Tulang Bawang: Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- Grindle, M.S. (2007). *Good Enough Governance Revisited*. *Development Policy Review*, 25(5), 533-574
- Hidayat, A. (2019). *Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Integrasi Sektoral*. *Jurnal Bina Praja*, 11(2), 211-223.
- Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang. (2022). *Laporan Evaluasi Kinerja OPD Tahun 2021*.
- Kurniawan, D., & Rahmawati, Y. (2021). *Efisiensi Anggaran dalam Program Pembangunan Daerah*. *Jurnal Manajemen Publik*, 13(3), 56-71.
- NOVERMAN DUADJI *Good Governance dalam Pemerintah Daerah MIMBAR*, Vol. 28, No. 2 (Desember, 2012): 201-209
- Peters, B.G. (2010). *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration*. Routledge.
- Setyowati, R., & Nugroho, R. (2019). "Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Studi pada Pemerintah Kabupaten di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 133-148.
- Siregar, M. (2020). "Akuntabilitas Horizontal dan Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah." *Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 122-136.
- Suharto, E. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan: Kajian Kritis terhadap Musrenbang*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 65-82.
- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). *Participatory Planning in Indonesia: Seeking a Path to Democratic Development*. *Policy Studies*, 28(1), 1-15.
- Yuliani, T., & Mahfud, M. (2020). "Strategi Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Implementasi Good Governance di Pemerintah Daerah." *Jurnal Reformasi Administrasi*, 7(1), 45-57.
- Yusran, L. (2018). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Era E-Government*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 45-59.